

KEGAGALAN AKULTURASI BUDAYA DAN ISU AGAMA DALAM KONFLIK LAMPUNG

The Failure of Cultural Acculturation and Religious Issues in the Conflict of Lampung

M. ALIE HUMAEDI

Pusat Penelitian Kemasyarakatan
dan Kebudayaan LIPI
Jl. Gatot Soebroto No. 10,
Jakarta 12710
Hp.: 08157901576
e-mail: m.alie.humaedi@lipi.go.id
dan aliehumaedi@yahoo.com
Naskah diterima: 7 Juli 2014
Naskah direvisi: 2–9 Oktober 2014
Naskah disetujui: 11 Nopember
2014

ABSTRACT

Social disaster, such as Lampung conflict, is dangerous. It can lead to many losses, either material or immaterial, and the humiliation of human and nation dignity. The contestation of various political economic interests with cultural differences implemented by ethnic groups in Lampung had resulted in conflict. The main question of this writing is how the cultural acculturation of the natives of Lampung and Balinuraga led to the conflict. The answer to the question will help people to prevent similar conflicts of other regions. This was ethnographic research whose data were collected through in-depth interview, observation, and document analysis. The findings showed that the failure of cultural acculturation between the natives and the Balinuraga was the main root of the conflict.

Keywords: Lampung Conflict, acculturation, social interaction, the roots of conflict, Balinuraga

ABSTRAK

Bencana sosial, seperti konflik Lampung, sangat berbahaya, karena membuahakan banyak kerugian jiwa, material, mental, dan rendahnya pemertabatan manusia dan bangsa. Kontestasi berbagai kepentingan ekonomi politik dengan perbedaan kebudayaan dalam pola pikir, pandangan hidup dan praktik budaya yang dipresentasikan kelompok-kelompok etnik di Lampung telah menjadi penyebab pecahnya konflik. Persoalannya, bagaimana proses akulturasi kebudayaan antara suku asli Lampung dengan Balinuraga yang memecah menjadi serangkaian konflik itu dapat terjadi? Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan para pihak dapat mencipta peringatan dini pencegahan konflik sosial di berbagai daerah yang memiliki kemiripan dengan keadaan Lampung. Penelitian kualitatif etnografis melalui wawancara mendalam, obeservasi, dan penelusuran dokumen telah menemukan bahwa kegagalan akulturasi budaya antara suku Lampung adalah akar masalah dari konflik Lampung. Interaksi sempit karena ketiadaan ruang-ruang bersama dalam perjumpaan lintas budaya telah menyebabkan kegagalan akulturasi yang memungkinkan tidak pernah terciptanya pemahaman dan upaya kolaborasi berbagai budaya dapat dilakukan.

Kata kunci: Konflik Lampung, akulturasi budaya, interaksi sosial, akar konflik, Balinuraga

PENDAHULUAN

Pasca lengsernya rezim Orde Baru, intensitas konflik komunal di berbagai daerah semakin tinggi. Hal ini terlihat khususnya pada dua dekade terakhir di wilayah yang memiliki peta rawan konflik tinggi, seiring terbukanya saluran politik identitas ke partai politik ataupun tata kelola pemerintahan. Setidaknya tercatat tiga konflik komunal yang menjadi catatan sejarah kelam bahwa bangsa Indonesia belum dapat mengelola perbedaan dan keragaman berbagai identitas itu. Konflik agama (Islam-Kristen) di Ambon dan Maluku, konflik agama (Islam-Kristen) di Poso, dan konflik suku Dayak dan Madura di Kalimantan, merupakan tiga peristiwa konflik yang berskala besar dan memakan korban ribuan jiwa (Hikam 2014: 92-93). Konflik lain yang menghiasi wajah Indonesia seperti Sampang Madura, Cikeusik Banten, peperangan antardesa dan ulayat di Papua dan Nusa Tenggara, dan disusul tragedi lain di berbagai daerah dengan pola dan sebab yang berbeda.

Kerusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, dan Ras) itu bisa juga mengelaborasi motifnya pada persoalan kesalahpahaman, penguasaan sumber daya, dan persoalan Pemilukada di suatu daerah (Haris 2014: 24-28). Perkelahian atau amuk massa antarkampung di Nusa Tenggara dan Sulawesi seperti kejadian Palopo 2013, tidak semata dipahami sebagai perselisihan sekelompok pemuda tentang asmara, sebagaimana juga misalnya asumsi-asumsi yang diajukan pada kasus penyebab konflik Sampang Madura, atau pertentangan sekelompok massa tentang batas-batas tanah. Akar persoalannya juga dapat diartikan sebagai suatu runtutan akumulatif dari proses-proses yang disebabkan oleh persoalan kompleks, termasuk di dalamnya persoalan SARA dan kepentingan politik identitas yang mengatasnamakan itu.

Pasca perdamaian Malino sebagai ikhtiar penyelesaian konflik Poso, penulis pernah mengatakan dalam berbagai forum ilmiah (UN OCHA 2011, UNDP 2012, dan HFI 2013), bahwa setelah Poso, konflik seperti itu akan

terjadi setidaknya di tiga wilayah lain. Wilayah tersebut adalah Lampung, Sumatera Utara, dan Papua. Perkiraan terhadap wilayah konflik baru didasarkan pada indikasi-indikasi dari tingkat kerawanan sosial di tiga daerah yang luar biasa tinggi, sebagai akibat dari kegagalan pendidikan harmoni, provokasi atas nama politik identitas (untuk kepentingan Pemilukada), kesenjangan ekonomi antara penduduk lokal dengan warga pendatang, pemusatan *enclave-enclave* komunitas kolonisasi, transmigrasi, dan wilayah tradisional yang didasarkan pada etnik dan agama, dan proses interaksi dan akulturasi dua atau lebih dari karakter kebudayaan masing-masing etnik yang tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam suatu irama kehidupan bersama.

Dugaan atau prediksi di atas pun terbukti benar, setidaknya untuk sementara pada satu wilayah utama. Kerusuhan atau konflik komunal antara suku Bali (walaupun *direduksi* menjadi Balinuraga saja) yang menetap secara terpisah dengan suku Lampung (yang *digeneralkan* oleh para etnik pelaku menjadi warga Lampung) yang tersebar di beberapa kecamatan pecah pada tanggal 27 – 29 Oktober 2012 di Desa Balinuraga dan Sidoreno, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan. Pemicunya amat sederhana dari sebuah kejadian kecil yang multitafsir dan kemudian dibesar-besarkan dengan isu yang berbau agama dan etnis, diiringi dengan kebencian antaretnik yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa, hilangnya harta benda, dan trauma berkepanjangan, tetapi juga menyebabkan segregasi antaretnik Bali dan Lampung di berbagai wilayah Lampung semakin jelas, dan meningkatnya angka kriminilitas perampokan dan pemalakan di berbagai wilayah yang sebelumnya tidak tinggi.

Permasalahannya, bagaimana proses kegagalan akulturasi kebudayaan antara suku asli Lampung dengan Balinuraga yang memecah menjadi serangkaian konflik itu dapat terjadi? Penelusuran penyebab kegagalan akulturasi budaya dan keterlibatan isu agama antara

berbagai pihak yang berdiam diri pada wilayah yang sama menjadi sangat penting untuk memberikan rambu-rambu atau peringatan dini potensi konflik bagi wilayah lain yang memiliki karakter dan kondisi yang sama dengan Lampung.

Konflik dapat terjadi karena adanya berbagai faktor. Konflik termasuk bencana sosial yang kapan dan di mana pun bisa saja terjadi di wilayah yang memiliki kondisi keragaman etnik, agama, dan bahasa. Keragaman ini menjadi anugerah bagi khazanah peradaban, namun di sisi lain menjadi ancaman besar bagi kehidupan berbangsa, terlebih saat ada salah kelola dalam kebudayaan ataupun kebijakan pembangunan. Padahal komposisi penduduk Indonesia cukup beragam, yaitu dihuni ratusan etnik dan ribuan kelompok etniknya (termasuk marga dan *fam*), ratusan bahasa (625 bahasa daerah), beragam agama dan kepercayaan, termasuk jenjang ekonomi berbeda antara satu kelompok etnik dengan etnik lain, dan bentangan wilayah luas dan strategis dalam lalu lintas perdagangan dan politik global.

Secara alamiah, keragaman etnis, bahasa, suku, dan agama antara satu dengan lain tentu secara jelas dan tegas akan memiliki perbedaan substansial jika dilihat dari sisi sistem sosial, fungsional struktur sosial dan praktik kebudayaan. Sayangnya, keragaman itu belum dikelola secara baik. Sebaliknya, keragaman lebih tampak sebagai 'sesuatu yang lain' yang kerap kali dipertentangkan. Konsepsi antara diri (*self, al-ana*) dan yang lain (*other, al-akhar*) kemudian secara tegas dipraktikkan dalam wujud nyata kehidupan bersama. Tidak luput, politik identitas yang melekat pada batasannya pun dimainkan oleh antek kepentingan sebagai langkah taktis dari pemulus politik kekuasaan. Adalah keniscayaan, intensitas ancaman konflik di masyarakat pun semakin tinggi dan meluas cakupannya.

Rangkaian konflik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia seakan tidak pernah terputus, dan semuanya tetap berujung pada kekerasan. Kekerasan sepertinya menjadi sebuah pentas paling digemari untuk memaksakan kehendak

atas nama apapun. Dari sisi inilah, dua orang sejarawan; Colombijn & Linbald (2002) sampai pernah menyatakan bahwa "*Indonesia is a violent state*" (Indonesia adalah sebuah negara gagal). Fenomenanya tidak hanya berada pada kelompok elite yang berkepentingan secara politik kekuasaan saja, tetapi juga pada kelompok-kelompok masyarakat biasa yang terhimpit oleh masalah-masalah kebutuhan hidup dan sebagainya.

Dalam permasalahan ini, menurut Dahrendorf (1976) konflik dapat dimaknai dalam dua perspektif. *Pertama*, konflik adalah konsekuensi atau akibat dari tidak tuntasnya proses integrasi di dalam suatu masyarakat. Kegagalan integrasi ini disebabkan salah satunya oleh proses akulturasi yang gagal di antara dua komunitas atau lebih yang memiliki sistem kebudayaan, agama, dan etnisitas yang berbeda. *Kedua*, konflik dapat pula dipahami sebagai sebuah proses alamiah dalam rangka proyek rekonstruksi sosial. Dalam konteks ini konflik dilihat secara "fungsional" sebagai suatu strategi untuk menghilangkan unsur-unsur disintegratif di masyarakat yang tidak terintegrasi secara sempurna (Goncing, 2012).

Banyak teori tentang penyebab atau akar masalah yang menciptakan konflik di Indonesia. Selama ini, konflik umumnya dipahami sebagai bagian tidak terpisahkan dari persoalan kekuasaan dari kelompok-kelompok bertikai. Padahal ada beberapa penyebab lain yang perlu dicermati, yaitu pandangan mengenai perjuangan atas kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti keamanan, pengakuan identitas, penerimaan eksistensi, akses terhadap lembaga politik dan partisipasi ekonomi. Adanya Politik kekuasaan yang ikut campur dalam konflik individu dan komunal. Dalam kacamata Marxian (Haryatmoko 2004), campur tangan seperti ini tentu menjadi pola terstruktur untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan kolonial. Politik kekuasaan merupakan varian penting dalam konsep konflik sosial berkesinambungan (*protracted social conflict-PSC*), sebagaimana dikenalkan oleh Edward Azar (1990).

Menurut Azar, sekurangnya ada empat variabel penting dalam PSC, yaitu: (i) *communal content and discontent*, yaitu sikap puas atau tidak puas kelompok identitas tertentu terhadap realitas sosial dan politik yang ada. Salah satu upaya untuk meredam konflik tersebut dapat dilakukan jika masyarakat saling mengakui identitas kelompok masing-masing, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Selain itu perlu dibuka akses terhadap dialog antarkelompok identitas dan proses sosialisasi identitas masing-masing kelompok hingga ke tingkat akar rumput atau lapisan paling bawah untuk meredam intensitas konflik yang disebabkan oleh *communal discontent* ini; (ii) *deprivation* atau degradasi sosial, yaitu pengingkaran terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial kelompok-kelompok identitas yang ada. Keluhan yang muncul akibat degradasi sosial seringkali diekspresikan secara kolektif, seperti pada kasus konflik-konflik di Indonesia. Sebut saja misalnya Balinuraga Lampung, kasus Syiah Sampang Madura, dan kasus kelompok Ahmadiyah di Cikeusik. Pemicu utama degradasi sosial tersebut, salah satunya adalah pembangunan ekonomi yang bermasalah atau pembagian kue kesejahteraan yang tidak seimbang. Hal ini dapat meningkatkan frustrasi sosial bagi kelompok lain untuk segera memulai konflik dengan pihak yang dianggapnya diuntungkan itu; (iii) *the quality of governance* atau kualitas administratif lembaga pemerintah. Kapabilitas negara dalam mengkombinasikan penggunaan kekerasan, perangkat hukum, kekuasaan, legitimasi, dan sistem birokrasi dalam mengatur masyarakat, melindungi warga negara, menyediakan kebutuhan material, sangat penting dalam upaya memberikan kepuasan bagi berbagai kelompok identitas yang ada; dan (iv) *international linkage* atau keterkaitan internasional, yaitu adanya hubungan konflik pada suatu wilayah tertentu dengan berbagai aktor dan peristiwa internasional. Hal ini terkait dengan isu-isu transnasional yang dibawa dalam konteks lokal, seperti isu tentang Sunni-Syiah, ISIS, dan isu trans nasional lainnya.

Oleh karena itulah, selain kepentingan kekuasaan, stimulus penyebab konflik pun sepertinya memiliki kaitan erat dengan persoalan lain, seperti pengakuan harga diri (eksistensi), kenyamanan bersama dalam ruang-ruang sosial yang ada, aksesibilitas terhadap pembangunan, dan lingkungan sosial kebudayaan sekitarnya. Terkait pada aksesibilitas pembangunan, penelitian Lambang Trijono (2007) tentang pembangunan sebagai perdamaian, konflik bertumpu pada dasar-dasar ketidakadilan pembagian kue pembangunan itu. Wajar kemudian jika upaya penyelesaian konfliknya pun dikaitkan pada kemampuan dan tata kelola pemerintah dalam pembangunan tersebut. Namun secara umum, dapat dinyatakan bahwa empat variabel PSC dengan porsinya masing-masing dan ditambah beberapa varian lainnya sangat terlihat pada kasus konflik Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian etnografi konflik Lampung cukup berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian ini terdiri dari dua kali perjalanan dengan menggunakan skema berbeda. Penelitian pertama difasilitasi oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yang dimulai tiga hari pasca konflik terjadi sampai hari ke-15. Saat itu, peneliti ikut bersama Caritas Tanjung Karang, *United Nation Organization Coordination Humanitarian Affairs* (UNOCHA), dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam proses evakuasi dan respon masyarakat berdampak. Tujuan awal *rapid assesment* mendukung pelayanan kemanusiaan. Pengumpulan data wawancara mendalam belum dilakukan ke masyarakat berdampak dan pelaku. Wawancara baru dapat dilakukan kepada masyarakat di sekitar wilayah berdampak. Ada sekitar 22 informan yang berasal dari kelompok Bali KOGA, korban pemiskinan orang Bali di berbagai desa, aparat, dan kepolisian. Sementara pengumpulan data melalui pengamatan cukup signifikan, karena dampak dan keadaan wilayah pasca konflik benar-benar terlihat langsung.

Setelah penelitian pertama selesai, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, memfasilitasi penelitian lanjutan tentang penyebab konflik Lampung. Wawancara mendalam pun telah dapat dilakukan kepada 30 orang informan, baik yang berasal dari pelaku penyerangan, masyarakat berdampak, jaringan lembaga kemanusiaan, tokoh masyarakat, dan lainnya. Pengamatan pun dilakukan pada proses pemulihan pasca konflik, dan beberapa aktivitas pendukung upaya perdamaian. Sementara penelusuran dokumen perjanjian, kesepakatan, pemberitaan media massa, keluar masuk bantuan, kebijakan pemerintah dan sebagainya menjadi bagian tidak terpisahkan dari teknik pengumpulan data kualitatif secara etnografis ini. Setelah seluruh data terkumpul, maka kategorisasi data beserta analisisnya dilakukan secara seksama. Interpretasi terhadap beberapa data dilakukan dengan cara mengaitkannya dengan berbagai aspek, sehingga analisisnya saling terkait satu dengan hal lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Konflik Komunal Balinuraga-Lampung

Sebuah wilayah teramat tenang yang berada di Kecamatan Way Panji Lampung Selatan yang hanya terdiri dari 4 desa, yaitu Sidoharjo, Sidoreno, Balinuraga, dan Sido Makmur, tiba-tiba terkenal berskala nasional dan internasional karena kerusuhan. Kerusuhan itu dikenal “Kerusuhan Lampung” atau “Kerusuhan Balinuraga”. Sebutan Balinuraga yang melekat dalam kata kerusuhan, tidak hanya menunjuk pada suatu tempat kejadian, tetapi juga bisa menunjuk sebagai korban dan termasuk di dalamnya sebagai pemicu utama dari kerusuhan yang menewaskan 14 orang, 166 (data lain menyebut 355) rumah hangus terbakar dan ribuan orang mengungsi. Sebagai tempat kejadian, pasti mudah mengidentifikasi, karena berhubungan dengan satu wilayah yang berada di Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Demikian juga sebagai “korban”, orang akan mengenalnya secara mudah, karena hal itu terkait

erat dengan orang dan wilayah yang terkena dampak langsung dari penyerangan banyak orang. Sementara berhubungan dengan pemicu utama kerusuhan, tentu memunculkan banyak tafsir khususnya bila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya (Humaedi 2013: 9-12).

Kerusuhan Balinuraga berlangsung tiga hari, yaitu dari Sabtu 27 Oktober sampai Senin 29 Oktober 2012. Kerusuhan ini bermula dari kejadian jatuhnya dua orang gadis Lampung yang bernama Nurdiana Dewi warga Desa Agom dan Emiliya Elisa warga Desa Negeripandan Kecamatan Kalianda dari motor pada pukul 17.00, hari Sabtu. Sebelumnya mereka hendak pulang ke rumahnya usai membeli peralatan kecantikan di sebuah minimarket di Pasar Patok-Sidoharjo, Kecamatan Way Panji. Saat perjalanan pulang itu, disebut-sebut ada sekelompok pemuda Bali yang sedang berkerumun di atas jembatan jalan Patok-Agom-Way Arong yang menggoda mereka dengan cara berusaha “memegang payudara”, sehingga akhirnya kedua gadis terjatuh. Cerita dengan banyak versi akhirnya berkembang luas dan telah memicu amarah warga Lampung lainnya.

Penyerangan pertama dilakukan pada pukul 22.00 sampai larut malam hari Sabtu, 27 Oktober. Sekitar 500 orang berbaju hitam dan mengendarai motor menyerang Balinuraga. Gerakan massa bermotor dari Desa Agom ini dilakukan untuk “memberi pelajaran” kepada pemuda Balinuraga. Namun, setelah ada perlawanan, kelompok ini mundur dan hanya mampu membakar rumah Ketua Parisadha Sidoreno. Karena penyerangan pertama gagal, persiapan penyerangan kedua pun dilakukan. Pada pagi harinya, Minggu, 28 Oktober, konsentrasi massa penyerang dalam jumlah ribuan orang (ada sekitar 3.000 orang) dengan berbagai jenis senjata (senjata rakitan, parang, golok, pisau, celurit, tombak, dan lainnya) mulai berkumpul kembali di seputaran pasar Patok-Sidoharjo. Mereka datang dari berbagai “wilayah tua” orang Lampung yang akan menuju Balinuraga. Aparat keamanan yang berjumlah ratusan orang tidak lagi bisa membendung massa

dalam jumlah ribuan itu. Sekitar pukul 11.00 sampai 15.00 hari Minggu, serangan ke Balinuraga kembali dilakukan. Saat serangan kedua inilah, korban jiwa jatuh dari kelompok penyerang. Ada tiga orang yang tewas, yaitu: Marhadan bin Samsunir (warga Dusun Jembatbesi, Desa Gunungterang Kalianda), Yahya bin Abdullah (warga Desa Hatipermai, Kalianda), dan Alwin bin Solihin (warga Desa Sukaraja, Tajimalela, Kecamatan Palas). Beberapa orang lain terluka cukup parah.

Dua kekalahan itu tidak menyusutkan semangat untuk melakukan serangan kembali. Serangan ketiga pun dilakukan pada Senin, 29 Oktober 2012, dari pukul 14.00-16.00. Banyak cerita tentang serangan ketiga yang "harus dilakukan." Menurut informan, ketika serangan kedua yang menewaskan tiga orang Lampung ini dilaporkan kepada seorang yang dianggap *pengihang*, sebut saja raden I (E dan D dari Keradenan), mereka menjadi murka dan memerintahkan untuk memberi "pelajaran berarti" bagi orang Balinuraga. Apa yang disampaikan oleh *pengihang* itu pun akhirnya menjadi semacam petuah atau restu agar seluruh orang yang berasal dari suku Lampung dari berbagai daerah harus membantu saudaranya, Lampung Agom, dalam pertempuran melawan orang Balinuraga.

Akhirnya, senin siang, puluhan ribu (20.000 orang) massa suku Lampung dari berbagai daerah di Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Utara pun terkumpul di lapangan Caringin. Jumlah ini tidak mengada-ada, karena lapangan selebar 120 meter x 60 meter itu penuh manusia, dan massa pun meluap juga ke jalan yang ada di depannya, belum ditambah dengan orang yang telah menunggu terlebih dulu di sepanjang jalan Patok-Way Arong itu. Kalau kejadian ini dianggap spontan, maka tidak akan ada koordinasi massa sebesar itu, di samping juga tidak akan ada yang mengkoordinasikan melalui provokasi melalui *mini microphone* yang sudah disiapkan. Apalagi saat berlangsungnya proses penyerangan, pemecahan kelompok-

kelompok massa beserta para pemimpinnya pun telah dilakukan secara rinci.

Setelah masing-masing kelompok memiliki koordinator dan pendamping lapangan, mereka mulai bergerak menuju arah Balinuraga. Kelompok pertama yang terdiri dari 8.000 orang menjurus ke arah Balinuraga dari arah pasar Patok Sidoharjo yang berhadapan langsung dengan aparat keamanan yang sudah bersiap di pasar Patok dan Sidoreno. Pada awalnya, massa dari kelompok pertama ini untuk sementara berhasil dihadang aparat polisi dan tentara dengan kekuatan 1.500 sampai 2.000 personil. Namun, penghadangan itu tidak lebih dari setengah jam, karena massa terus merangsek membongkar barikade Dalmas, Brimob, dan mobil *water cannon*. Mereka pun segera menuju Desa Balinuraga yang berjarak 3 km dari pasar Patok. Dalam perjalanan itu, mereka menyisir dan membakar rumah orang Bali yang ada di Sidoreno, tetangga Desa Balinuraga. Ada sekitar 6 rumah yang dibakar, dan tidak ada korban jiwa di Desa Sidoreno, karena di desa ini memang tidak ada perlawanan dari orang Bali, dan sebagian besar telah mengungsi ke rumah-rumah orang Jawa dan masjid al-Hikmah.

Aparat dan orang Balinuraga saat itu hanya berkonsentrasi pada massa dari kelompok pertama. Padahal dua kelompok lain juga telah bergerak menyerang Balinuraga dari dua sisi berbeda. Kelompok kedua menjurus ke arah Balinuraga dari arah samping kanan dengan mengambil rute wilayah belakang Sidoharjo dan Sidoagung yang melalui permukiman orang Bali Korban Gunung Agung (Koga). Saat di wilayah Bali Koga, massa penyerang tidak satupun menyentuh atau merusak rumah orang Bali itu. Mereka terus melanjutkan perjalanan ke Balinuraga dari arah samping kanan. Sementara kelompok ketiga menjurus ke arah Balinuraga dari arah Sidoreno bagian samping kiri. Akhirnya, massa dari kelompok kedua dan ketiga sampai lebih dahulu dibandingkan kelompok pertama.

Keduanya dapat menohok kelompok orang Balinuraga dari arah samping dan belakang

moyangnya dianggap sebagai pemberontak. Mereka pergi ke Lampung, tidak menggunakan sistem transmigrasi yang difasilitasi oleh pemerintah, tetapi berikhtiar dari pembiayaan sendiri. Sementara orang Bali yang menempati Sidomulyo adalah orang Bali yang menjadi korban dari letusan Gunung Agung dan diberangkatkan pemerintah melalui program kolonisasi. Reduksi dalam arti Orang Balinuraga diartikan sebagai target sasaran yang dianggap paling bersalah dari peristiwa kerusuhan yang seringkali terjadi.

Keempat, untuk menyelamatkan diri dari tuduhan sebagai pelaku kekerasan dan atau meminimalisir konflik ini adalah konflik komunal atas nama suku, maka suku Lampung yang berasal dari 40 desa dari Kecamatan Kalianda, Palas, Sidomulyo, Penengahan, dan beberapa desa yang berada di Pringsewu Lampung Barat lalu mewajah diri secara general sebagai warga Lampung. Konsep warga Lampung, seperti konsep warga negara, menjadi konsep heterogonitas, dimana pelibatan banyak orang dalam penyerangan dimaknai berasal dari berbagai kelompok etnik dalam *enclave* kewargaan umum yang mengarah atau ditentukan pada musuh bersama seluruh komunitas. Orang Bali (Nuraga) lalu dianggap musuh bersama dari semua kelompok warga Lampung, sehingga suku Lampung sebagai pelaku utama tertutup dalam wajah rupa kelompok etnik lain, seperti Jawa, Sunda, dan Banten. Artinya, warga suku Lampung secara spesifik dan homogen digeneralikan menjadi warga Lampung yang terdiri dari banyak suku.

Upaya generalisasi bagi kelompok penyerang menjadi "warga Lampung" bertujuan untuk menyatakan diri bahwa yang marah bukan hanya "orang suku Lampung" tetapi semua orang dari berbagai suku yang menjadi warga Lampung. Penggeneralan seperti ini dimaksudkan untuk menyebar argumen pembenaran bahwa apa yang dilakukan mereka didasarkan pada fakta kejengkelan terhadap suku Bali yang telah direduksi kembali hanya menjadi "Balinuraga". Pemusatan hanya Balinuraga, semakin menegaskan bahwa kemarahan "warga Lampung"

itu berasal dari kebencian semua pihak yang berada pada cakupan warga Lampung. Kenyataan ini tentu terkait pada variabel sikap puas dan tidak puas (*communal content and discontent*) kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Sikap seperti inilah yang menstimulus sejak awal sebuah proses kegagalan akulturasi antara suku Bali dan suku Lampung.

Bahkan dalam wawancara dengan Penggiat Jaringan Advokasi Masyarakat Lampung, informan K, bahwa pelaku penyerangan bukan semata orang yang berasal dari suku Lampung, tetapi semua warga berbagai suku yang tinggal di Lampung. Dengan merunut 38 kali peristiwa konflik yang melibatkan orang Bali, dan 8 di antaranya terjadi di Lampung Selatan, menunjukkan bahwa orang Bali telah menjadi musuh bersama semua warga Lampung. Oleh karena itu, orang Bali harus introspeksi diri, di samping juga meminimalisir apa-apa saja yang membuat komunitas lain tidak mau bergaul atau menganggap mereka musuh bersama.

Kelima, persoalan *piil pesingiri* yang dibangkitkan dan dikemas dengan isu pelecahan wanita berjilbab dari suku Lampung asli. Apalagi salah satunya berasal dari kampung Tua Kalianda. Definisi *piil pesingiri* sendiri sulit diterjemahkan. Ketika informan I dan N, ditanya tentang *piil*, mereka hanya memberikan contoh; (i) bila kamu tidak diundang dalam hajatan tetangga, ya secara *piil* jangan datang; (ii) bila tetangga kamu tidak pernah datang dalam kerja masyarakat, maka secara *piil* kamu tidak perlu datang dalam kegiatannya. Apakah *piil* berarti "harga diri"? Informan tidak membenarkan arti kata itu. Awalnya sulit mendefinisikan, tetapi informan lain menyebutkan masalah ini adalah sebagai pandangan hidup.

Dari segi falsafah hidup pada hakekatnya masyarakat Lampung memiliki kesamaan pandangan hidup yang disebut *piil pesengiri*. *Piil Pesengiri* adalah tatanan moral sebagai pedoman bersikap dan berperilaku orang Lampung dalam segala aktivitas hidupnya. Falsafah hidup *piil pesengiri* ini ada sejak terbentuk dan tertatanya

masyarakat. *Piil* (*piil*=Arab) artinya perilaku, dan *pesengiri* maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban (Syani 2013). *Piil pesengiri* merupakan potensi sosial budaya yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai positif, hidup terhormat dan dihargai di tengah kehidupan masyarakat. Sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan, maka masyarakat Lampung berkewajiban untuk mengendalikan perilaku dan menjaga nama baiknya agar terhindar dari sikap dan perbuatan yang tidak terpuji.

Piil pesengiri sebagai lambang kehormatan harus dipertahankan dan dijiwai sesuai kebesaran *Juluk-adek* yang disandang (hak anggota masyarakat berdasar hirarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat; *Pengiran, Dalom, Batin, Temunggung, Radin (pengihang), Minak, dan Kimas*); semangat *nemui nyimah* (sikap kepedulian sosial dan setiakawan); *nengah nyappur* (sikap suka bergaul, bersahabat dan toleran antarsesama; musyawarah mufakat) dan *sakai sambaiyan* (tolong menolong dan gotong royong) dalam tatanan norma *Titie Gemattei* (jalan kebiasaan berupa keharusan, kebolehan dan larangan berbuat dalam penerapan elemen *Piil Pesengiri*). *Piil-pesengiri* pada hakekatnya merupakan nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk mempunyai hati nurani yang positif (bermoral tinggi atau berjiwa besar), sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis dan estetis (Syani 2012).

Artinya, bila desa-desa di Kalianda dianggap kampung tua, maka kewajiban warga Lampung yang diposisikan sebagai adik untuk mendukung. Apalagi yang terganggu adalah kehormatan gadis dan keluarganya, maka isu itu menjadi semangat luar biasa bagi pengerahan massa. Alasan adanya *piil pesingiri* menjadi penting dalam anatomi konflik, karena ini berhubungan dengan politik identitas dan kesakralan emik kelompok etnik tertentu. Bahwa seorang gadis Lampung terjatuh dari motor, tidak semata dilihat persoalan kecil yang bisa diselesaikan

dengan mudah, tetapi menjadi persoalan yang sangat besar bila ia diletakkan dalam garis norma *piil* dan apalagi diperhadapkan dengan identitas lain yang dianggap sebagai anomie *piilnya*, yang anti pembauran, karena orang Bali dianggap tidak pernah bergaul dan menerima kebudayaan masyarakat pribuminya.

Posisi Balinuraga yang anti pembauran atau adanya kegagalan proses akulturasi pada sisi lain, di mana prosesnya sangat bertentangan dengan *nengah-nyappur* dalam *piil pesingiri* orang Lampung, terlihat jelas dalam suatu *enclave* khusus yang mempraktikkan tradisi dan kebiasaan Bali tanpa sentuhan kebudayaan si tuan rumah, yaitu identitas kebudayaan Lampung; baik berupa simbol terlihat seperti *siger*, bahasa, dan sebagainya; ataupun praktik kebudayaan pembauran sebagaimana diamanatkan dalam *sakai sambaiyan* akan serta merta menjadi musuh bersama dari setiap individu yang terlahir sebagai suku Lampung.

Kegagalan Akulturasi atau Isu Agama

Melihat penyebab konflik Lampung, tentu tidak bisa berdiri pada satu aspek saja, tetapi bersifat perpaduan dari banyak aspek. Jika ditilik secara mendalam, setidaknya ada tiga penyebab konflik Lampung, yaitu (i) akumulasi persoalan dari berbagai kejadian atau benturan orang Bali dengan orang Lampung; (ii) sistem ekonomi rente yang dipraktikkan orang Bali telah membuat banyak orang Lampung dan suku lain berada pada proses pemiskinan; (iii) perilaku keroyokan orang Bali dalam penyerangan atau selisih paham. Ketiganya adalah aspek-aspek yang terlihat nyata dalam kehidupan keseharian (Humaedi 2012).

Namun, ada juga aspek tidak kalah krusialnya yang membuat perselisihan antara orang Bali dengan non-Bali (Lampung) itu semakin tampak dan berusaha menemukan titik letupannya. Aspek itu adalah aspek interaksi dan relasi sosial yang amat terbatas dan kurang menemukan salurannya, sehingga ada kegagalan proses akulturasi budaya antara orang Bali dengan

orang Lampung. Orang Bali (Nuraga) umumnya membuat *enclave* (permukiman) tersendiri yang didasarkan pada kesamaan agama, adat ritual dan *pasraman* (pemangku adatnya). Pada setiap *enclave* inilah pura besar (pura utama) didirikan, di samping juga kewajiban setiap rumah untuk membuat sanggar-sanggar sebagai media ritual dan menjadi simbol "keimanan dan kesalehan seseorang".

Sebelum konflik Oktober 2012 itu, pada kasus Balinuraga, keimanan dan kesalehan untuk sementara diartikan sanggar, tidak dilebarkan dalam pengertian memahami, berbuat baik, dan meletakkan dasar dharma bagi kepentingan manusia yang lintas batas. Bisa diartikan bahwa penghayatan masyarakat yang seperti ini adalah bentuk kegagalan dari pemangku Parisadha yang tidak menjadi teladan atau panutan masyarakat dalam proses pembelajaran dan keberagaman, kecuali semata dalam urusan ritual saja. Kegagalan pembelajaran kemanusiaan ini juga berbuah tidak adanya kesadaran orang Balinuraga terhadap penghormatan hak-hak orang lain, praktik kehidupan bersama dengan orang Non-Bali, dan aspek yang menghargai perbedaan karakter dan praktik budaya orang lain. Walaupun kegagalan tokoh agama Hindu (Parisadha) ini tidak dimanfaatkan para pelaku kerusuhan untuk merusak sanggar-sanggar (tempat ibadah) orang Bali tersebut.

Dalam kasus kerusuhan itu, memang ada beberapa sanggar yang dirusak, tetapi pengerusakan itu rata-rata dilakukan tidak disengaja, karena menjadi bagian dari rumah. Kalau konflik Lampung tersebut didasari oleh motif agama, maka pastilah semua sanggar, pura, dan sesaji yang ada di seluruh rumah orang Bali ataupun pura utama pastilah akan dirusak hebat. Kerusuhan Balinuraga akhirnya tidak didasari pada motif (penghinaan) agama, tetapi murni kejengkelan dan dendam yang membara atas perilaku orang Bali (Nuraga) yang arogan atau eksklusif secara kebudayaan dan sering menekan dalam urusan sosial ekonomi.

Kejengkelan itu disebabkan tidak adanya komunikasi, interaksi dan relasi sosial yang intens antara orang Balinuraga dengan non-Bali. Interaksi keduanya hanya diberlangsungkan pada urusan ekonomi, yang dirasakan menyakitkan bagi orang Non-Bali. Rente itulah yang menyakitkan, walaupun perekrutan tenaga kerja berbayar dari orang non-Bali juga sebagian keuntungan yang dirasakan. Namun, ibarat "setitik tuba menghancurkan susu sebelanga", maka keuntungan itu kalah menyakitkan dengan perilaku rente. Interaksi sosial yang dibangun hanyalah didasarkan pada keuntungan ekonomi, bukan suatu proses pembelajaran bersama memahami praktik dan karakter budaya masing-masing pihak.

Orang non-Bali merasa sangat tidak nyaman masuk atau bekerja di rumah orang Bali, sebagai akibat banyaknya anjing dan babi yang berkeliaran. Dua binatang itu dianggap najis (*najis mughaladhah*) oleh orang non-Bali yang rata-rata Islam. Orang Bali juga dikenal tidak mengindahkan tata cara menyiapkan makanan halal. Anehnya, dua perilaku yang dianggap kurang nyaman oleh orang Non-Bali masih selalu dipraktikkan orang Bali (Nuraga), padahal sebelumnya telah ada peraturan desa, bahwa dua binatang itu harus dikandangkan dan tidak boleh berkeliaran. Praktik beternak babi dan merawat anjing dalam jumlah yang banyak di lingkungan rumah inilah yang telah membuat orang non-Bali sangat malas untuk berkunjung ke rumah orang Bali, sekalipun telah dikenal akrab.

Artinya, telah terjadi kegagalan dalam proses akulturasi budaya antara orang Bali dengan orang Lampung, karena interaksi di antara mereka sangat sempit, dan seringkali terjadinya komunikasi yang buntu. Salah satu penyebab dari kegagalan akulturasi itu adalah karena tidak adanya ruang-ruang pertemuan bersama dalam arti imajiner dan fisik antara seluruh "warga Lampung", khususnya antara suku Bali dengan suku Lampung. Apa yang disebut ruang pertemuan imajiner adalah satu perasaan bahwa orang Balinuraga adalah bagian tidak terpisahkan

dari komunitas bersama Lampung. Perasaan inilah yang menghadirkan penghargaan terhadap nilai-nilai yang dianut bersama, dan mengatur posisi antara diri (*al-ana*) dan liyan (*al-akhar*). Tentu, perasaan dan penghargaan itu adalah hasil dari satu proses bersama dan intens yang dilakukan oleh setiap kelompok suku yang ada.

Sementara apa yang disebut ruang pertemuan fisik adalah perjumpaan langsung dalam aktivitas bersama, misalnya bermain bersama (pada usia anak-anak), ngobrol bersama walaupun sekadar canda, lomba, beraktivitas bersama dalam urusan sosial ekonomi, memecahkan persoalan bersama, jejaring organisasi, dan sebagainya. Melalui pertemuan fisik itulah, sifat dan nilai-nilai antara dua suku khususnya dapat diketahui, dan menghasilkan ikhtiar saling memahami dan mengerti. Sayangnya, dalam catatan masyarakat, ruang-ruang pertemuan antara suku Lampung dan Balinuraga itu sangat tidak intens, sehingga selalu memunculkan syak wasangka dan dendam yang terus terpendam.

Salah satu komunikasi buntu itu terlihat jelas pada pertemuan Sabtu malam 27 Oktober setelah dua gadis Lampung itu jatuh. Ketika kepala desa Agom, MS, dan keluarga N datang langsung ke Balinuraga untuk menemui pemuda dan orang tua Bali tanpa koordinasi ke pemangku wilayah setempat, baik kepala desa Balinuraga ataupun pemangku banjar. Demikian juga ketika utusan Balinuraga di rumah MT bersifat arogan dan tidak meminta maaf, dan mengkomunikasikan masalah ini dengan tenang, padahal di sekeliling mereka massa Lampung dari Desa Agom telah berkumpul dan meminta pertanggungjawabannya. Sikap dari kelompok Balinuraga dalam mensikapi masalah gadis Lampung yang jatuh telah menyebabkan kerusuhan dan penyerangan terhadap Balinuraga.

Soal interaksi yang sempit sehingga mempersulit proses pembauran berbagai komunitas juga dipengaruhi oleh model permukiman yang didasarkan pada etnik. Sebagaimana diketahui bahwa permukiman orang Balinuraga adalah hasil program transmigrasi

swakarsa, di mana permukiman seluas 500 hektar itu disediakan pemerintah, dan biaya hidup dan perjalanan ditanggung sepenuhnya oleh kelompok transmigrannya. Wilayah transmigran Balinuraga benar-benar didiami kelompok etnik Bali yang berasal dari Nusa Penida, tidak seperti wilayah transmigrasi lain yang dibaurkan dengan etnik lain atau kelompok Bali dari wilayah lain. Model permukiman ini telah menciptakan satu-kesatuan atas dasar ikatan primordial sebagai "orang Balinuraga" yang berada di atas rata-rata orang Bali pada umumnya, dan apalagi terhadap orang dari kelompok etnik lainnya.

Demikian pula apa yang terjadi dengan wilayah Agom pun memiliki kesamaan. Agom pada awalnya adalah wilayahnya tanah tidak bertuan, masuk dalam kategori tanah negeri, bukan tanah marga, mulai dibuka oleh seorang Cina yang memiliki pekerjaan menjadi pemburu. Kepindahan orang Cina ini akhirnya diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Lampung. Salah satu motif perpindahan mereka adalah untuk mendapatkan tanah-tanah baru yang bisa difungsikan sebagai kebun-kebun mereka. Banyak informasi yang mengatakan bahwa orang yang datang itu sebenarnya adalah orang yang berasal dari "kelompok adik" yang tidak atau sedikit mendapatkan tanah dari pembagian waris keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam tradisi suku Lampung, warisan orang tua sepenuhnya dikuasai oleh kakak tertua, dan atas dasar kemauan atau kerelaan kakak tertua itulah para adik bisa mendapatkan bagian kekayaan orang tuanya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dialami transmigran Balinuraga yang datang ke wilayah baru untuk meningkatkan taraf hidup, orang suku Lampung yang datang ke Agom pun sebenarnya adalah pendatang yang sama berusaha mencari penghidupan. Walaupun saat ini, Agom relatif terbuka dengan adanya pendatang Jawa, Banten dan Sunda yang membeli rumah orang Agom, dibandingkan Balinuraga yang masih tertutup.

Orang Bali yang datang ke Agom hidup secara berkelompok dalam ikatan primordial. Menurut

Brenda SA Yeoh (1997: 49-52), pola permukiman yang didasarkan oleh ikatan etnik atau primordial lain merupakan ciri permukiman yang dibangun oleh kolonial. Bentuknya selalu *enclave* dengan menggunakan satu sistem sosial yang homogen. Motif awalnya didasarkan pada prasangka bahwa kelompok etnik itu akan menjadi sumber masalah bila digabungkan dengan kelompok etnik lain. Rupanya, cara berpikir kolonial itu ditiru pemerintah Orde Baru, bahwa kelompok Balinuraga yang berasal dari Nusa Penida yang dikenal keras dan *stereotype* lain itu dikumpulkan pada satu *enclave* tertentu. Walaupun alasan awal pengumpulan mereka pada satu tempat itu sebenarnya hanya alasan teknis, yaitu bisa beternak babi. Namun, alasan teknis itu sebenarnya wajahrupa dari mekanisasi kultural rezim yang didasarkan pada pertimbangan motif yang ada sebelumnya.

Sementara model permukiman orang suku Lampung didasarkan pada model kampung tradisional, di mana kekuatan keluarga batih dan ikatan primordial hadir memperkuat hubungan diantara para pendatang itu. Perbedaannya dengan suku Bali, wilayah Agom tercipta dengan sendirinya, dan Balinuraga "diciptakan" oleh suatu rezim. Akibatnya, ada akar kecemburuan sejak awal berdirinya dua perkampungan itu. Hal inilah yang memperkuat sifat arogan orang Balinuraga, dan menebalkan sifat rendah diri orang Lampung yang masing-masing mencari salurannya. Selama bertahun-tahun, sifat itu pun dipupuk, sifat arogan Balinuraga melahirkan sistem tertutup komunitas sehingga tidak mau bergaul dengan komunitas lain. Sementara sifat rendah diri masyarakat suku Lampung memupuk semangat "politik identitas" untuk menampakan jati diri di tanahnya sendiri. Semuanya berproses masing-masing, tanpa pembauran sebagai buah interaksi yang gagal, sehingga prasangka etnik semakin menebal dan mencari letupannya. Salah satu letupan itu adalah harus dengan konflik terbuka, karena boleh jadi mereka telah lama menahan konflik laten di antara mereka sendiri.

Seluruh kenyataan yang ada sejajar dengan pemikiran Azar (1990) mengenai konflik sosial berkesinambungan, dari variabel sikap puas dan tidak puas terhadap kelompok tertentu. Menurutnya, berbagai kelompok identitas yang ada di dalam masyarakat; kelompok etnis, religius, dan kekerabatan, pada saat tertentu dapat merasakan bahwa kondisi sosial dan politik yang ada sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tetapi pada saat lain kelompok-kelompok tersebut dapat merasa kecewa atau bahkan frustrasi terhadap situasi yang mereka anggap mengganggu eksistensi dan melecehkan identitas mereka. Ilustrasinya, hubungan sosial ekonomi antara orang Lampung dan Bali dalam jual beli janur, misalnya, akan dianggap memuaskan kedua belah pihak, tetapi praktik ekonomi rente, beternak babi, dan arogansi orang Bali dalam pergaulan sosial telah menghadirkan ketidakpuasan bagi orang Lampung.

Satu hal penting lainnya dalam melihat kegagalan akulturasi yang menyebabkan konflik Lampung adalah terkait dengan isu etnosentrisme. Hampir semua konflik bernuansa etnis seringkali dikaitkan dengan semangat etnosentrisme yang sempit, sebagaimana yang ditampakkan oleh suku Lampung dan Bali dalam sejarah pergaulan sosialnya. Etnosentrisme adalah sebuah cara berpikir yang menjadikan kelompok sendiri sebagai pusat dari segalanya dan menjadi tolak ukur dalam menilai dan mengukur kelompok lain. Tiap-tiap kelompok diasumsikan memupuk sendiri-sendiri kebanggaan dan harga diri, merasa superior, mengagungkan kesucian kelompok sendiri dan memandang rendah kelompok lain. Tiap kelompok berpikir bahwa tradisi cara pikir dan tindak kelompoknya adalah yang paling benar sementara tradisi kelompok lain selalu dilihat dengan penuh kehinaan (Bertrand 2004: 60-63 dalam Gocing 2012). Sikap ketidakpuasan dan kepuasan juga didasarkan pada etnosentrisme ke-Lampung-an dan Ke-bali-an. Perhatikan sikap *fil* dan semangat *banjar* dari dua komunitas berbeda itu. Semuanya berujung pada pandangan etnosentrisme yang ketat, di

mana proses akulturasi budaya akan mengalami hambatan yang cukup hebat.

Etnosentrisme mengandung perilaku positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan perilaku atau penyikapian negatif terhadap kelompok lain (*outgroups*). Sikap etnosentrisme ditandai oleh kesetiaan pada kelompok, antipati terhadap kelompok lain, kompensasi yang nyata dan adanya manipulasi para pemimpin kelompok tersebut. “*Leader manipulation*” ditandai oleh adanya pemimpin yang seringkali melihat manfaat bagi diri sendiri atas etnosentrisme. Oleh karenanya ia berusaha meningkatkan spirit itu melalui eksploitasi rasa takut dan benci terhadap kelompok lain (Bertrand 2004: 82-82 dalam Goncing 2012). Semua aspek ini telah benar-benar menggagalkan akulturasi dua kebudayaan etnik itu, sehingga berujung pada pecahnya konflik Lampung.

PENUTUP

Kegagalan akulturasi budaya antara suku Balinuraga dengan Lampung yang dimulai prosesnya dari ketiadaan ruang sosial bersama diyakini sebagai akar masalah konflik Lampung. Sayangnya, masalah ini seringkali tidak dilihat para pemangku kepentingan dan lembaga kemanusiaan dalam proses penyelesaian konflik Lampung. Penanganan yang ada hanya berhubungan dengan kegiatan di masa tanggap darurat, yaitu pemberian bantuan makanan, akomodasi, dan jaminan keamanan. Para penanganan bencana kemudian pergi meninggalkan masyarakat tanpa ada program lanjutan yang bisa memupus akar persoalan konflik, antara Balinuraga dengan suku Lampung.

Program aksi yang berusaha memupus akar konflik, khususnya membuka ruang sosial bersama dari dua belah pihak secara jangka panjang tidak begitu terlihat. Jangankan untuk akulturasi budaya yang membawa harmoni, interaksi sosial di antara mereka masih bersifat sempit. Padahal hal ini penting dilakukan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada

pemengertian hidup bersama pada wadah dan identitas kewarganegaraan Indonesia. Dengan jalan membuka interaksi sosial bersama pada ruang sosial bersama memungkinkan proses akulturasi budaya akan mungkin terjadi.

Demi kepentingan di atas, penelitian ini menyarankan dua hal. *Pertama*, salah satu sarana membuka ruang sosial yang berimbang pada proses akulturasi budaya dari kelompok-kelompok berbeda adalah pendidikan. Pendidikan itu tidak bersifat formal di sekolah, tetapi juga mencakup pendidikan keluarga, pendidikan di dalam komunitas, dan pendidikan non formal seperti pesantren dan *pasaraman*. Konsep pendidikan di wilayah seperti Lampung yang dipenuhi heterogenitas etnik, budaya dan agama, yang diajukan harus berbeda dengan konsep pendidikan di tempat lain yang masih bersifat homogen secara kebudayaan. Pendidikan harmoni yang mengedepankan inklusifisme dalam budaya perlu dikembangkan pemerintah, lembaga kemanusiaan dan pendidik di wilayah Balinuraga dan Lampung. Pola dan praktik pendidikan eksklusif yang homogen harus segera ditinggalkan masyarakat, karena hanya akan menebalkan karakter kebudayaan awal dan perasaan primordialisme.

Kedua, perlu dilakukan penelitian etnografis secara mendalam praktik kebudayaan dan sistem sosial masyarakat yang berdampak dan masyarakat yang berada di luar berdampak dari sisi pemicu konflik, faktor konflik, dan mekanisme internal yang bisa didorong untuk penyelesaian konflik. Selain merumuskan program aksi yang tepat, baik mikro ataupun makro, dengan sistem zonasi yang tepat dan strategis bagi kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak lain, juga dapat menjadi bahan dasar pelaksanaan program lanjutan transformasi konflik jangka panjang yang bisa ditiru oleh masyarakat penanganan bencana dan pemerintah dalam kasus penyelesaian bencana sosial yang ada di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan terimakasih kepada Humanitarian Forum Indonesia (HFI), khususnya kepada Direktur HFI, Ibu Hj. Hening Parlan yang memberikan kesempatan melakukan *rapid assesment* konflik Lampung. Demikian juga disampaikan terimakasih kepada para Romo, Bruther, dan Suster yang tergabung pada Caritas Tanjung Karang Lampung, yang memungkinkan peneliti dapat terlibat langsung dalam proses evakuasi dan respon terhadap masyarakat berdampak. Terakhir, ucapan terimakasih disampaikan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang memfasilitasi penelitian tindak lanjut dari penelitian sebelumnya bersama HFI.

DAFTAR PUSTAKA

- Azar, Edward, 1990. *The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Practice*. Aldershot, USA: Dartmouth.
- Bertrand, Jacques. 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia.*, Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Colombijn, Freek and J. Thomas Lindblad (eds.). 2002. *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*. Singapore: ISEAS.
- Dahrendorf, Ralf. 1976. *The Modern Social Conflict: an Essay to the Politics of Liberty*. London: Weidenfeld and Nicolson.
- Gonceng, Muhammad Abdi. 2012. Peristiwa Konflik Balinuraga Lampung Selatan dan Persatuan Indonesia, dalam <http://ighoelmachete.wordpress.com/2012/12/16/peristiwa-konflik-balinuraga-lampung-selatan-dan-persatuan-indonesia/> (Diakses tanggal 4 Oktober 2014).
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Harris, Marvin. 1997. *Culture, People, Nature: An Introduction of General Anthropology*. USA: Longman Inc.
- Haryatmoko. 2004. *Etika Politik Kekuasaan*. Jakarta: KPG.
- Hefner, Robert W. 1990. *Geger Tengger. Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LkiS.
- Humaedi, M. Alie. 2013. *Konflik Komunal Lampung-Bali: Anatomi dan Pemicu Konflik*. Laporan Penelitian. Jakarta: LIPI
- _____. 2012. *Assessment Brief Kerusakan Lampung: Perumusan Mekanisme Penanganan Bencana Jejaring HFI*. Jakarta: Laporan HFI & UN OCHA.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik, di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syani, Abdul. Falsafah Hidup Masyarakat Lampung: Sebuah Wacana Terapan. Dalam <http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/falsafah-hidup-masyarakat-lampung-sebuah-wacana-terapan/>. diunduh 28 Juni 2014.
- _____. Pluralitas Budaya di Lampung, Konflik dan Solusinya. Dalam. <http://abdulsyani.blogspot.com/2013/11/pluralitas-budaya-di-lampung-konflik.html>. diunduh 28 Juni 2014.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yeoh, Brenda SA. 2007. "Migration and Social Diversity in Singapore", in *Singapore Perspectives 2007*, edited by T.H. Tan, pp. 47-56. Singapore: World Scientific Publishing.